

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2014 menjadi titik penting dari perjalanan dan dinamika demokratisasi di Afghanistan. Setelah melewati dua kali pemilihan umum yang memberi ruang partisipasi masyarakat Afghanistan pada 2004 dan 2009, pemilihan umum presiden 2014 kembali diselenggarakan di negara itu. Banyak kalangan berharap bahwa, setelah sekian lama dilanda konflik dan ketidakpastian transisi politik pasca perang, penyelenggaraan pemilihan presiden kali ini merupakan batas akhir masa transisi demokrasi dan menjadi titik awal dimulainya konsolidasi demokrasi. Hal ini bukan saja merupakan momentum politik biasa (dalam konteks siklus demokrasi), melainkan momentum sejarah untuk Afghanistan yang meningkatkan posisinya menjadi negara demokrasi yang stabil.

Perkembangan arus demokratisasi di Afghanistan yang berjalan begitu cepat terhitung sejak jatuhnya rezim Taliban pada 2001 menandai transisi menuju demokrasi di Afghanistan. Pengalaman Afghanistan yang berada dalam kurungan rezim otoriter sebelumnya tentu saja sedang mencari pola demokratisasi yang tepat untuk dipraktekkan. Hamid Karzai yang terpilih sebagai Presiden Afghanistan pada tahun 2004 melalui pemilihan umum menjadi awal.

Keberangkatan Afghanistan menuju sebuah negara yang oleh sarjana politik sebagai “transisi menuju demokrasi”. Dilanjutkan dengan terpilihnya kembali Hamid Karzai melalui pemilihan umum pada 2009, menjadi langkah Afghanistan dalam

mempersiapkan fase demokratisasi yang berikutnya. Hal ini semakin nampak ketika diselenggarakannya sidang parlemen pertama yang melibatkan 351 anggota parlemen yang dipilih secara demokratis, kultur politik tradisional, khususnya yang ditandai dengan kuatnya peran budaya Islam dan ulama, secara perlahan berganti menjadi kultur politik demokratis di mana peran masyarakat Afghanistan semakin besar dalam mempengaruhi keputusan pemerintah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kepemimpinan Karzai pada periode yang kedua menjadi sebuah landasan yang mempersiapkan Afghanistan untuk melangkah ke fase demokratisasi selanjutnya. Kemudian pada 2014, pemilihan umum kembali dilaksanakan. Pemilihan ini menjadi harapan terbesar bagi masyarakat Afghanistan untuk menyeleksi pemimpin yang memang benar-benar berkualitas dengan melibatkan seluruh kepentingan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan pemilu tersebut menjadi proses transfer kekuasaan yang panjang sebab masing-masing dari calon kandidat mengklaim menang dalam pemilihan umum tersebut.

Persoalan mengenai hasil pemilu 2014 diselesaikan dengan jalan damai. Kesepakatan pembagian kekuasaan atau pembentukan Persatuan Nasional (Unity Government) dipandang sebagai jalan terbaik bagi penyelesaian sengketa pemilu

Di Afghanistan, Hal ini merupakan saran dari pihak yang sejak awal mengawal proses demokrasi di Afghanistan, yakni Amerika Serikat. Mohammad Ashraf Ghani terpilih sebagai Presiden Afghanistan dan Abdullah Abdullah sebagai Ketua Dewan Eksekutif yang setara dengan Perdana Menteri.³ Penyelenggaraan pemilihan umum tersebut merupakan wujud dari keberhasilan proses demokratisasi di Afghanistan

yang berlangsung selama tiga kali pemilu demokratis.

Menurut Samuel P. Huntington, perjalanan suatu negara ke arah demokrasi sejatinya melalui 3 tahapan penting, yakni; (1) Berakhirnya Rezim Otoriter, (2) Munculnya pemerintahan demokratis, dan (3) Adanya konsolidasi demokrasi. Era transisi demokrasi mestinya telah berakhir setelah dua kali pemilu berkala secara demokratis, dimana pemilu-pemilu itu mengantarkan ke suatu rezim demokratis, bekerja atas dasar konstitusi yang demokratis pula.

Pernyataan Samuel P. Huntington kemudian diperkuat lagi oleh Azyumardi Azra. Menurutnya, untuk mengamati demokratisasi suatu negara tidak hanya dinilai pada proses jalannya pemilu karena terdapat kriteria lain yang harus dimiliki oleh suatu negara sehingga dikatakan sukses atau gagal dalam mencapai transisi demokrasi, yaitu dapat dilihat melalui komposisi elit politik, desain institusi politik, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan Samuel P. Huntington,

Elit dan non elit, serta peran *civil society* (masyarakat madani) itu sendiri. Keempat faktor tersebut harus berjalan secara sinergis dan sebagai modal untuk mengonsolidasikan keteguhan demokrasi.

Dari pemaparan kedua tokoh di atas, dipahami bahwa Afghanistan telah berhasil membangun demokrasi di negaranya melalui era pemerintahan Hamid Karzai. Keberhasilan dapat diraih karena Afghanistan—meskipun sebagai negara yang baru dalam mengimplementasikan demokrasi—mampu melakukan sejumlah langkah dan kebijakan penting yang menjadi landasan untuk memastikan transisi

demokrasi itu tercapai. Dalam hal ini, tahapan-tahapan yang dimaksud oleh Samuel P. Huntington ialah yakni; pertama, jatuhnya pemerintahan Taliban, kedua munculnya pemerintahan demokratis Hamid Karzai, dan agenda selanjutnya adalah konsolidasi demokrasi.

Menurut pakar politik Guillermo O'Donnell, konsolidasi demokrasi merupakan fase di mana stabilitas dan ketahanan demokrasi terjadi dalam sebuah rezim. Sedangkan pakar lainnya, Larry Diamond, menyebut konsolidasi sebagai legitimasi demokrasi yang secara luas dan kuat diterima sebagai suatu "rezim" yang benar dan tepat bagi masyarakat. Proses konsolidasi tidak selalu bersifat *linear*. Dalam banyak kasus, setelah transisi dikatakan berakhir, masih terdapat banyak tugas yang harus diselesaikan, kondisi yang harus diciptakan, dan sikap Serta kebiasaan yang harus diperkuat sebelum demokrasi bisa dianggap terkonsolidasi.¹

Selain itu, menurut Saiful Mujani, agar demokrasi terkonsolidasikan, warga negara diharapkan menjadi seorang yang setia, yakni yang tertarik pada politik dan percaya pada institusi politik.² Kepercayaan masyarakat yang lemah terhadap partai politik akan menyebabkan demokrasi juga melemah, dan dari sini partai politik harus memainkan peranan-peranan dan fungsi-fungsinya yang strategis.

Sementara itu, pandangan yang berbeda disampaikan Frans Beker dan Rene Cuperus, menurutnya meluasnya konsolidasi demokrasi tidak senantiasa berjalan secara *linear* dengan menguatnya peran partai politik sebagai lembaga intermediasi

¹ Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi: Pengalaman Baru Muslim Dalam Transisi Indonesia*, (Bekasi: Gugus Press, 2002), h. 93.

² Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, h. 323

kepentingan antara rakyat dan pemerintah. Karena melihat realita yang ada di negara, partai politik bahkan mulai digantikan perannya oleh organisasi-organisasi mediasi yang menjadikan dirinya sebagai perantara opini antara masyarakat dan negara.³ Semakin banyaknya individu atau lembaga yang berpartisipasi dalam mengawal demokratisasi, semakin terkonsolidasi demokrasi.⁴

Pemilu 2014 menjadi titik penentu bagi proses konsolidasi demokrasi di Afghanistan. Ketua Dewan Pers Nasional Afghanistan, Abdul Hamid Mubariz menilai peran pemuda dan perempuan sangat dominan dalam pilpres 2014. Dia mengatakan bahwa 65 persen populasi rakyat Afghanistan dibentuk oleh pemuda

Perempuan di bawah 30 tahun dan sekarang, terlibat aktif di banyak ranah politik dan sosial. Para pengamat politik juga mengatakan, terlepas dari siapa yang akan memenangi kontes demokrasi itu, pelaksanaan sukses pilpres Afghanistan mengirim sejumlah pesan pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Mengenai pesan-pesan tersebut, rakyat Afghanistan dengan partisipasi luasnya dalam pemilu menunjukkan bahwa mereka mulai memahami bahwa suara dan peran mereka sangat menentukan masa depan negara.⁵

Namun, tidak semua proses tersebut bisa selalu berlangsung mulus. Ada negara

³ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 2-3.

⁴ Iran Indonesian Radio, "Membangun Demokrasi di Afghanistan".

⁵ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 135.

⁷ Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter dan Laurence Whitehead, *Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif*, (Jakarta: LP3ES, 1993), h. 6-7.

yang berhasil menjalani transisi, tetapi gagal menjalani konsolidasi demokrasi. Proses demokratisasi merupakan sesuatu yang memang tidak mudah dan butuh kesungguhan, konsistensi, kesabaran, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Begitupula dengan perjalanan demokrasi di Afghanistan, bukan tidak mungkin jika seorang pemimpin mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan segala persoalan pemerintahan, seperti yang terjadi di Afghanistan di era kepemimpinan Hamid Karzai.

Tingkat pengangguran di Afghanistan yang semakin meningkat, tidak adanya kebijakan anggaran yang transparan, serta para pejabat menjadi lebih kaya dari hari ke hari, telah membuat perekonomian di Afghanistan saat itu menjadi tidak stabil. *Transparency International* (TI) yang merupakan organisasi non- pemerintah telah mempublikasikan bahwa rezim Hamid Karzai berada dalam daftar tertinggi sistem pemerintahan yang paling korup. Informasi ini cukup.⁷

Kredibel mengingat definisi korupsi sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, kegagalan Hamid Karzai dalam mempertahankan keamanan nasional juga menjadi hal yang cukup diperbincangkan oleh para pengamat politik. Padahal pemerintah Afghanistan saat itu bersama dengan pasukan koalisi pimpinan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) telah bersusah payah menata kehidupan sosial politik dan keamanan agar bebas dari gangguan serangan milisi Taliban. Seluruh pelaksanaan NATO

⁸ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), h. 84.

menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat Afghanistan.

Tentu hal itu menjadi kewajiban kepemimpinan selanjutnya dalam membangun Afghanistan yang lebih progresif. Terpilihnya Mohammad Ashraf Ghani pada September 2014 diharapkan mampu menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bagi Afghanistan. Tata pemerintahan yang baik dalam hal ini adalah pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan dan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Harapan dan keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) juga merupakan tekad yang pernah diucapkan oleh Mohammad Ashraf Ghani saat beliau dilantik sebagai Presiden Afghanistan yang secara langsung dipilih oleh rakyat.¹⁶ Harapan dan keinginannya ini diimplementasikan ke dalam kebijakan-kebijakannya selama menjabat, terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2016, setelah melewati masa transisi demokrasi.

Tahun 2014 diharapkan menjadi momentum tegaknya pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, dan berakhirnya krisis berkepanjangan yang dialami masyarakat Afghanistan. Untuk itu, skripsi ini akan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Mohammad Ashraf Ghani dalam membangun *good governance* di Afghanistan, terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2016

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan mendasar yang menjadi acuan penelitian ini adalah:

Bagaimana Legitimasi politik pemerintahan Asraf Gani di Afghanistan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain: Untuk mengetahui legitimasi politik pemerintahan Asraf Gani di Afghanistan

D. Kerangka Teori

D. 1 Teori Legitimasi

Dalam ilmu politik, legitimasi diartikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin.^[1] Dalam konteks legitimasi, maka hubungan antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpin lebih ditentukan adalah keputusan masyarakat untuk menerima atau menolak kebijakan yang diambil oleh sang pemimpin.

Legitimasi dapat diperoleh dengan berbagai cara yang dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yakni secara simbolis, prosedural atau material (Ramlan Surbakti, 1992), sedangkan Max Weber mendefinisikan tiga sumber untuk memperoleh legitimasi adalah tradisional, karisma dan legal/ rasional.

Dari cara dan sumber perolehan tersebut lahirlah beberapa tipe legitimasi yaitu: legitimasi tradisional, legitimasi ideologi, legitimasi kualitas pribadi, legitimasi prosedural dan legitimasi instrumental. Legitimasi

tradisional adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima kewenangan, keputusan atau kebijaksanaan yang diambil pemimpin dalam lingkup tradisional, seperti dalam kehidupan keraton yang seluruh masyarakatnya terikat akan kewenangan yang dipegang oleh pimpinan mereka dan juga karena hal tersebut dapat menimbulkan gejolak dalam nurani mereka bahwa mereka adalah bawahan yang selalu menjadi alas dari pemimpinnya.⁸

Melalui risetnya selama dua puluh tahun tentang Timur Tengah, Hudson dalam bukunya *Arab Politics: The Search for Legitimacy* menulis bahwa persoalan sentral pemerintahan negara-negara Timur Tengah adalah masalah legitimasi politik (1974). Legitimasi adalah keabsahan kekuasaan penguasa untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Dengan legitimasi, rakyat menaati dan setia kepada pemimpinnya.⁹

Dalam konteks pemerintahan, legitimasi memiliki fungsi sebagai prasyarat menjalankan kekuasaan, menciptakan stabilitas, dan sekaligus mengelola konflik. Legitimasi bisa dirunut dari tiga pilar pentingnya, yaitu:¹⁰

- a. hak untuk berkuasa (*authority*),
- b. persoalan identitas nasional (*identity*) NATION BUILDING
- c. serta persamaan hak (*equality*) yang tidak dirasakan.

⁸ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0408/27/opi03.htm>

⁹ Diperoleh dari "<http://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi>"

¹⁰ Diperoleh dari "http://id.wikipedia.org/wiki/Legitimasi_tradisional"

D. 2 Keamanan

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari hubungan internasional (Buzan,1991). Karena konsepsi keamanan nasional ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan, pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan analisis hubungan internasional dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. Power atau kekuasaan itu sendiri secara simplistik merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan (Deutsch dalam Rosenau, 1976). Secara implisit hal ini menyimpulkan tentang terdapatnya faktor keamanan sebagai unsur yang menstimulasi pengupayaan pencapaian dari power itu sendiri.

Penyimpulan Buzan menyebutkan bahwa aspek keamanan ini telah menjadi satu pendekatan dalam Studi Hubungan Internasional kontemporer dengan menunjuk kepada motif utama perilaku suatu negara, yang memiliki perbedaannya sendiri dengan power sebagai kondisi yang dibutuhkan untuk terciptanya perdamaian (Buzan,1991).

Konteks anarki menentukan tiga kondisi utama dalam konsep keamanan yaitu (Buzan, 1991) :

Negara merupakan objek utama dalam keamanan karena kedua-duanya adalah kerangka aturan dan sumber tertinggi otoritas pemerintah. Hal ini menjelaskan mengenai kebijakan utama yaitu keamanan nasional.

Meskipun negara adalah objek utama keamanan tetapi dinamika keamanan nasional memiliki hubungan yang tinggi dan adanya interdependensi antara negara. Ketidakamanan negara dapat atau tidak dapat mendominasi agenda keamanan nasional tetapi ancaman eksternal akan selalu terdiri dari elemen-elemen utama dalam masalah keamanan nasional. Oleh karena itu, ide keamanan internasional dapat digunakan pada kondisi sistemik yang mempengaruhi usaha negara untuk membuat negara lain merasa lebih aman atau sebaliknya.

Dengan adanya kondisi anarki, arti praktis keamanan hanya dapat dibentuk jika ada suatu hubungan persaingan dalam lingkungan operasional yang tidak dapat dielakkan. Jika keamanan bergantung pada hegemoni atau harmoni maka hal ini tidak dapat dicapai dalam kondisi anarki. Dengan kata lain keamanan bersifat relatif bukan absolut.

Konsep keamanan merupakan salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna dibanding dengan konsep kekuatan dan perdamaian. Konsep keamanan ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrem antara kekuatan dan perdamaian (Buzan, 1991:2-3). Analisis keamanan memerlukan suatu cara pandang yang menempatkan negara dan sistem ke dalam sebuah hubungan timbal balik yang saling

menguntungkan dimana negara sebagian terbentuk dengan sendirinya dan sebagian lain dibentuk oleh lingkungan anarki yang kompetitif dan sengit. Lingkungan domestik dan dinamika internasional, keduanya merupakan hal yang paling penting bagi analisis keamanan karena merupakan hubungan yang kompleks di antara keduanya (Buzan, 1991).

Landasan utama dalam pendekatan ini yaitu lensa keamanan (security) yang dapat diartikan sebagai pelaksanaan kemerdekaan atas suatu ancaman tertentu atau kemampuan suatu negara dan masyarakatnya untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka terhadap kekuatan-kekuatan tertentu yang mereka anggap bermusuhan (hostile) (Buzan, 1991).

Menurut Barry Buzan dalam *People, States and Fear: an Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era* bahwa penerapan strategi keamanan suatu negara selalu memperhitungkan aspek-aspek threat (ancaman) dan vulnerability (kerentanan) negara tersebut. Ancaman dan kerentanan adalah dua konsep yang berbeda namun mempunyai keterkaitan yang erat di dalam perwujudan keamanan nasional. Suatu ancaman terhadap keamanan nasional yang dapat dicegah akan mengurangi derajat kerentanan suatu negara pada keamanan nasionalnya. Kedua aspek dari keamanan nasional tersebut sangat ditentukan oleh kapabilitas yang dimiliki negara tersebut (Buzan,1991).

Tidak seperti kerentanan, aspek ancaman sulit untuk diidentifikasi. Hal itu disebabkan karena bentuk ancaman seringkali lahir dari persepsi aktor pembuat kebijakan dan belum tentu secara substantif adalah nyata (Buzan,1991: 112). Ancaman

dan kerentanan inilah yang menjadi konteks hadirnya ketidakamanan nasional (national insecurity) (Buzan, 1991).

Ancaman dan kerentanan inilah yang menjadi konteks hadirnya ketidakamanan nasional (national insecurity) (Buzan, 1991).

E. Metoda Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menjelaskan rekam jejak aktivitas Taliban pada masa kepemimpinan Presiden Asraf Ghani. Selain itu metode penelitian kualitatif akan membantu penulis untuk mengetahui kepentingan aktor belligerent di Afghanistan yang terlibat. Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Lebih spesifik, cakupan bagian dari tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang relevan. Kemudian, hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library Research* untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapatdidapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta berbagai media

lainnya seperti internet, majalah ataupun surat kabar harian baik itu cetak maupun *online*.

3. Teknik Analisa Data

Ada banyak para ahli mengemukakan defenisi mengenai analisis data. Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Menurut Lexy J. Moleong , analisis data adalah proses mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan menurut Suprayogo analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Analisis data dilakukan setelah data diperoleh dari sampel melalui instrumen yang telah dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Data yang terkumpul tidak mesti seluruhnya disajikan dalam pelaporan penelitian, penyajian data ini adalah dalam rangka untuk memperlihatkan data kepada pembaca tentang realitas yang sebenarnya terjadi

sesuai dengan fokus dan tema penelitian. Oleh karena itu data yang disajikan dalam penelitian tentunya adalah data yang terkait dengan tema bahasan saja yang perlu disajikan.

Secara umum data yang disajikan untuk dianalisa tersebut dapat berupa karakteristik wilayah dan sampel kasus penelitian. Penyajian dimensi data seperti ini diharapkan dapat memperlihatkan kepada para pembaca setting dan konteks yang lebih spesifik dan penelitian yang sedang mereka baca. Data ada baiknya disajikan dari bentuk yang sederhana, kemudian diakhiri dengan penyajian data yang lebih relatif kompleks. Penyederhanaan alur penyajian data tersebut diharapkan dapat membantu para pembaca pelaporan penelitian kita untuk memahami keutuhan pelaporan secara lebih integratif.

Oleh karena itu data yang terkumpul tersebut perlu diolah dan dianalisis agar dapat memecahkan masalah penelitian. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Karena pada tahap ini peneliti harus memilih dan memastikan pola analisis yang digunakan sesuai dengan jenis data yang telah dikumpulkan, apakah menggunakan analisa statistik atau analisa non statistik.

Dalam penelitian ilmiah kita telah mengenal dua macam penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berikut ini pemakalah akan mencoba untuk menjelaskan teknik analisis data sesuai dengan macam atau jenis penelitian. Analisis Data Kuantitatif.

Statistika deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi (tanpa mengambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi apabila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial^{11, 12}.

Termasuk dalam statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau populasi.

¹¹ [Haris Herdiansyah](#), *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hal 46

¹² [Haris Herdiansyah](#), *Metodologi Penelitian kualitatif Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hal 46

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi tersebut dilakukan secara random. Statistik ini dinamakan statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang (probability). Didalam Statistik inferensial terdapat statistik parametris dan nonparametris. Stitistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel . Dalam statistik pengujian parameter melalui statistik (data sampel) tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Dalam statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statisti. Hanya dalam kenyataannya nilai parameter jarang diketahui. Statistik nonparametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi.

4. Analisis Data Kualitatif

Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data sangat tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif sehingga teknik analisa yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh Karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder yang akan menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti akan masuk dan selama dilapangan.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi Skripsi ini menjadi 4 BAB, dimana masing-masing BAB dirinci secara singkat dan sederhana, pembagian BAB serta perinciannya dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- 1. BAB I. PENDAHULUAN**
- 2. BAB II. GAMBARAN KONDISI AFGHANISTAN SEKARANG**
- 3. BAB III. LEGITIMASI PEMERINTAHAN ASRAF GHANI**
- 4. PENUTUP**